

JEMBATAN SURAMADU ANTARA KONFLIK DAN DEHUMANISASI MASYARAKAT MADURA

M. Ali Al-Humaidy

(Penulis, dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.
Kontak person 0818506545/masmalhum@yahoo.com, alamat; Arès Tengah Talang Saronggi Sumenep)

Abstrac

This simple article is not about to provoke Madurese people to deny the industrialization as the impact of Madura bridge establishment. However, theoretically the presence of industry causes social impact. The social conflict and dehumanisation (including marginalization and impoverishment) will be immediately occurred if the industrialization process does not involve the role of the stakeholders entirely and consistantly. Suramadu bridge is built in attempt to increase Madurese economic potency. As a matter of fact, the bridge appears the symbol of the victory of global capitalism to exploit the maximum benefit of Madura potency.

Kata-kata kunci

Karl Marx, conflict, Industry

Pendahuluan

Dalam pandangan penulis, Jembatan Suramadu tidak sebatas sebagai alat memperlancar arus transportasi Madura-Jawa dan percepatan pembangunan infrastruktur serta industri di Madura, namun juga sebagai alat transformasi nilai kebudayaan. Pembangunan Suramadu tidak hanya berdampak positif tapi akan muncul eksek negatif sebagaimana yang terjadi di daerah berbasis industri¹.

Salah satu eksek yang dimaksud adalah munculnya konflik sosial atau konflik antar kelas sosial (*social class conflict*) sebagaimana terjadi antara "kelas buruh" melawan "kelas majikan" dalam konflik hubungan-industrial, atau "kelas tuan tanah" melawan "kelas buruh-tani" dalam konflik agraria serta rebutan *resources* antara etnis pribumi (Madura) dengan pendatang (*ethnics and racial conflict*) yang mengusung perbedaan warna kulit dan berbagai bentuk konflik vertikal horizontal lainnya seperti sejarah Orde Baru dengan menggunakan 'militerisme'.

¹ M. Ali Al Humaidy, *NU dan Suramadu*, Opini Harian Surya, 10 Juni 2009

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan harmonis, dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan kepentingan, gagasan, dan faham di antar pihak yang berkepentingan. Tipe konflik bisa berbentuk pertentangan fisik (violent) dan non-fisik (non-violent).

Karena konflik merupakan bagian kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar seperti konflik antar individu atau kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan 'kepentingan' serta karakter yang melekat pada diri individu/kelompok yang mengakibatkan munculnya disharmoni. Oleh sebab itu, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik sebagai sebuah siklus di masyarakat. Tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik.

Perbedaan kepentingan merupakan benih konflik manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik diantara pihak-pihak yang bertentangan. Pertentangan juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan. Namun perlu dimaklumi bahwa hidup ini tidak selamanya bermuatan konflik atas dasar perbedaan karena dalam interaksi sosial ada keseimbangan pola; konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan sebagai proses fundamental sistem sosial.

Demikian juga dalam memotret masyarakat Madura setelah dibangunnya

jembatan Suramadu secara perlahan tapi pasti akan muncul konflik vertikal maupun horisontal, setidaknya saat ini muncul konflik tanah antara pemilik tanah di sekitar akses Suramadu dengan calon investor bahkan dengan *state* atas nama pembangunan. Konflik tanah bagian terkecil dalam hiruk pikuk dinamika masyarakat Madura karena hampir dipastikan ke depan muncul konflik yang lebih beragam dan tajam.

Tulisan sederhana ini hanya terfokus kepada pembahasan dampak 'kemenangan' kapitalisme atas dibangunnya jembatan Suramadu yang mengakibatkan konflik kelas yang pada akhirnya terjadi *dehumanisasi* terhadap masyarakat Madura sehingga dengan pandangan ini muncul *policy* yang berpihak masyarakat Madura.

Karl Marx: Teori Kelas dan Kapitalisme

Pengertian konflik sebagaimana tulisan penulis pada Jurnal Karsa Vol. XII No. 2 Oktober 2007 dengan menggunakan pendekatan teori Konflik Dahrendrof², Lewis A. Coser³ namun secara sosiologis penulis memahami konflik sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (antar pemilik modal, buruh, masyarakat, etnis) dimana

² Dahrendrof berpendapat bahwa kekuasaan dan wewenang merupakan sumber daya yang langka terhadap terjadinya pertikaian, sehingga menjadi sumber utama terjadinya konflik dan perubahan pada pola-pola yang telah melembaga, antara yang berkuasa dan yang dikuasai, dimana peranan yang berkuasa mempunyai kepentingan untuk mempertahankan keadaan dan yang dikuasai berkepentingan untuk membagi kembali kekuasaan dan wewenang.

³ Sedangkan Lewis A. Coser mendefinisikan konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan, sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memeproleh barang-barang yang diinginkan, melainkan ingin memojokkan, merugikan dan menghancurkan lawan mereka.

salah satu pihak berusaha merebut kekuasaan dengan cara menyingkirkan lawan.

Konflik komunal lebih parah lagi apabila akar persoalan konflik dipicu masalah kemiskinan dan keterdesakan ekonomi yang bercampur-baur dengan perasaan ketidakpastian kehidupan (*survival insecurity*) akibat datangnya kompetitor yang menyebabkan eskalasi dan intensitas konflik sangat mudah memuncak. Artinya, persaingan antar individu pada suatu kelompok melawan kepentingan individu pada kelompok yang berbeda menjadi bagian integral konflik sosial antar kelompok. Demikianlah sehingga pada banyak kasus, konflik kelompok (*group conflict*) dipakai untuk menunjuk pengertian konflik sosial (*social conflict*).

Karl Marx memandang proses perebutan masuk kategori konflik antar kelas, yang secara teoritis relevansi konflik antar kelas dengan gagasan Marx terletak pada *teori kelas* yang berpendapat bahwa sejarah masyarakat di dunia hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas untuk merebut kekuasaan.

Lenin sependapat dengan pemahaman Marx bahwa "kelas sosial" dianggap sebagai 'golongan sosial dalam tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi.

Meskipun teori ini masih dianggap belum jelas namun pernyataan diatas diperkuat oleh statemen Manifesto Komunis: 'sejarah semua manusia yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Tetapi dalam tulisan Marx terdapat juga indikasi bahwa, kelas sosial merupakan gejala khas masyarakat pascafeodal, sedangkan golongan sosial

dalam masyarakat feodal kuno lebih tepat disebut "kasta"⁴.

Ajaran Karl Marx diatas bermula pada abad ke 19 saat keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan⁵.

Munculnya kapitalisme yang menimbulkan terjadinya jurang pemisah antara yang memiliki alat produksi dan mereka yang hanya mempunyai tenaga (buruh). Perkembangan kapitalisme memperuncing kontradiksi antara kedua kategori sosial hingga pada akhirnya terjadi konflik diantara dua kelas. Kondisi ini yang di khawatirkan masyarakat Madura termasuk lembaga keagamaan Nahdlatul Ulama' dimana masyarakat Madura hanya diajdikan buruh industri apalagi sebagai 'korban' pembangunan.

Penulis meyakini kapitalisme akan berdampak 'penghancuran' sisi kemanusiaan karena kapitalisme hanya berorientasi penumpukan modal. Pendapat ini senyawa dengan gagasan Eric Hiariej bahwa Kapitalisme adalah formasi sosial yang tidak harmonis. Sistem ini dibangun di atas kontradiksi baik di wilayah ekonomi maupun pada ranah politik. Model produksi kapitalis selalu diwarnai dengan serangkaian konflik dan krisis karena hubungan produksi pada waktu tertentu akan selalu

⁴ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisioniems*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 111-112

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-darar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 139.

berada dalam kondisi yang menghambat perkembangan penuh kekuatan produksi.⁶

Oleh sebab itu, dua hal yang menjadi sorotan Karl Marx (1818-1883) *pertama* mengecam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya, akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya.

Untuk keperluan itu ia menyusun suatu teori yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan ajarannya dari gagasan-gagasan Sosialis Utopi ia menamakan ajarannya Sosialisme Ilmiah (*Scientific Socialism*)⁷.

Kedua munculnya feodalisme ketika terjadi penguasaan tanah oleh kelompok tertentu. Dalam perspektif sejarah, feodalisme adalah suatu mata rantai dari sistem hubungan kemasyarakatan antara kelas tuan tanah dan kelas budak yang terjadi di Eropa antara pertengahan abad IX sampai abad XV. Corak hubungan itu lebih khusus ditandai dengan ikatan *land ownership* yaitu berkait soal kepemilikan tanah⁸.

Dialektika perjuangan kelas tersebut mengindikasikan pertarungan antara kelas atas seperti para pemilik modal yang mempunyai nilai tawar tinggi (*powerfull*) berhadapan dengan kelas bawah yang cenderung sebagai pekerja dengan nilai tawar lemah (*powerless*). Secara simplikatif posisi *powerless* adalah masyarakat Madura

karena menurut data masyarakat Madura masih sangat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi, sebagaimana data laju pertumbuhan ekonomi 4 kabupaten pada tahun 2005⁹ sebesar 4,075 yang relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Selain itu, persentase rata-rata penduduk miskin di 4 kabupaten pada tahun yang sama sebesar 44,3 persen dan cenderung mengalami peningkatan.

Menurut Marx, hubungan-hubungan kelas senantiasa ditandai oleh hubungan eksploitasi dan secara tidak langsung mencerminkan pembagian kepentingan antara kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Pembagian kelas selalu mengandung benih konflik dan sering menimbulkan aktivitas perjuangan kelas. Inilah menurut Marx yang merupakan 'motor utama' yang menggerakkan perkembangan sejarah¹⁰.

Oleh sebab itu, kehadiran jembatan Suramadu bagian dari perjuangan kelas; pemilik pabrik vs buruh, pemilik tanah vs pembeli (juragan) tanah dan pekerja lokal vs pendatang. Munculnya perjuangan kelas ini tidak muncul secara tiba-tiba dan bersifat individual namun terorganisir dengan sistemik dengan melibatkan semua pihak termasuk *state* dalam pembangunan industri.

Corak hubungan berdasarkan kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut, biasanya sampai pada tingkat *state*, berpangkal pada kekuasaan raja atau bangsawan yang pada gilirannya

⁶ Eric Hiarij, *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto, Pertumbuhan dan kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*, (Yogyakarta; IRE Press Yogyakarta, 2005), hal. 31

⁷ Miriam Budiardjo, hal. 140.

⁸ Djoko Suryo, *Feodalisme: Timur dan Barat*, Prisma No 8 XX (Jakarta: LP3ES, 1991), hal 51

⁹ Muh. Syarif, *Pokok-pokok Pikiran Bidang Keuangan Daerah dan Investasi* dalam Rangkuman Pokok-pokok Pikiran Tim Ahli terkait Program Percepatan Pembangunan Madura, kerjasama Bappeprov Jatim dengan Universitas Trunojoyo Madura, 2008, hal 15.

¹⁰ Anthony Giddens, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, (Jakarta Rajawali Press, 1987), Hal. 4

memolakan suatu hubungan penghambaan. Pada awalnya, hubungan penghambaan ini muncul dalam kepentingan ekonomi yang berupa pengolahan industri tanah milik si penguasa atau tuan tanah oleh penggarapnya. Jadi corak perhubungan antara pemilik tanah dan penggarap tanah tersebut mulanya lebih berdasarkan prinsip *patriarchalism*¹¹ seperti yang terjadi di Mataram disana muncul feodal dalam pola *patriarchalism* di mana tokoh-tokoh elit lokal mendudukkan dirinya sebagai penguasa lokal dengan sejumlah atribut.

Menurut hemat penulis pembangunan jembatan Suramadu bagian dari 'kemenangan' kapitalisme dalam rangka menumpuk modal dan kekuasaan karena kecil peluang bangunan industri didasari faktor moral semata.

Para kapitalis secara sistemik akan mengeruk keuntungan dimana industri itu dibangun, sehingga dengan perputaran modal yang kuat akan semakin memperkokoh posisi dan nilai tawar mereka. Sebaliknya, masyarakat lokal akan dihisap oleh kapitalis yang membuat mereka tidak berdaya.

Ketidak berdayaan masyarakat Madura dalam pengelolaan ekonomi Madura mengakibatkan benturan sosial yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti etnisitas, identitas kelompok, ideologi, politik dan agama yang apabila tidak di *manage* dengan baik akan berakibat disintegrasi sosial, retaknya hubungan antar manusia, menipisnya nilai-nilai kebudayaan lokal sebagai salah satu perekat kehidupan sosial, saling curiga (*distrust*) dan dampak negatif lain yang tentu secara ekonomi

dan politik akan merugikan masyarakat Madura.

Proporsi apakah dengan sumber daya manusia Madura yang lemah akan berakibat langsung menjamurnya konflik sosial. Pertanyaan ini (mungkin) menarik dikaji lebih mendalam secara antropologis bila dikaitkan dengan memahami karakter orang Madura sebagaimana yang ditulis Mien Ahmad Rifai dalam Buku Manusia Madura¹².

Mengindustrialsiasikan Madura

Bagaimana dengan rencana industrialisasi di Madura? Penulis meyakini bahwa konflik kelas (industrial) pasti terjadi. Selain alasan teori yang menguatkan keyakinan penulis terjadinya konflik kelas diatas juga didukung alasan apakah pilihan industri benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat Madura (*button up*) dengan melibatkan seluruh *stakeholders* atau sebaliknya, semua pilihan industri ditentukan sepihak oleh pemilik modal termasuk konspirasi negara (Jakarta). Sebab, mengacu pada konsepsi Fukuyama, keberlangsungan usaha pada dasarnya tidak hanya ditentukan modal ekonomi (*economic capital*)—uang, tanah, rumah, teknologi/alat produksi dll, yang besarnya tentu akan berpengaruh pada besaran/skala usaha—tetapi juga terkait

¹¹ Djoko Suryo, 1991, hal. 51

¹² Dalam buku tersebut pada bagian 4 dijelaskan pembawaan orang Madura; èjhin (keperseorangan), gherra (kaku dan kasar), bangalan (pemberani), koko (kukuh), saduhuna (apa adanya), sacca (tulus setia), jijib (tertib), nongghang (melecehkan), ebir (pamer), pengko (keras kepala), sangap (tanggap), bilet (ulet), junèl (berkewirausahaan), lalampaan (petualangan), parempen (hemat dan cermat), sokkla (berkeagamaan), ta'-karata'an (lantang) dan banyak sifat lain yang cenderung *stereotype*. Lebih lengkap silahkan baca tulisan Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hal. 199-304.

dengan apa yang dikenal sebagai modal sosial (*social capital*)¹³.

Istilah industrialisasi mengacu ke pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang menyertai penerapan sumber-sumber kekuasaan yang tak-berperasaan untuk mekanisasi industri. Istilah industrialisasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan satu tahap di dalam perkembangan ekonomi dimana sumber-sumber modal dan tenaga kerja bergeser secara nisbi dan absolut dari kegiatan pertanian ke kegiatan industri, khususnya manufaktur. Industrialisasi pada awalnya mengambil bentuk produksi pabrik, kemudian lebih akhir meluas ke pertanian dan jasa.¹⁴

Tentu, tidak ada alasan untuk menolak industrialisasi karena industrialisasi bagian dari *ijtihad* untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat Madura sehingga dengan peningkatan ekonomi masyarakat Madura mampu mengembangkan diri (SDM), pendidikan dan kemandirian dalam mengelola *resources* yang ada.

Industrialisasi tidak semata mendatangkan secara ekonomi namun akan mengakibatkan perubahan-perubahan nilai/kultur masyarakat Madura. Meskipun, perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Pandangan ini telah penulis¹⁵ sampaikan dalam

pertemuan Pleno Tim Ahli terkait penyusunan Program Percepatan Pembangunan Suramadu di Surabaya bahwa dalam konteks pembangunan industrialisasi akan muncul dampak/permasalahan; *pertama* industrialisasi akan melahirkan stratifikasi sosial baru yaitu kelas masyarakat miskin dan pemiskinan baru. *Kedua* meningkatnya pengangguran masyarakat lokal Madura, *ketiga* konflik industri secara vertikal dan horisontal, *keempat* membanjirnya kemaksiatan seperti PSK dan *kelima* kriminalitas dan perjudian.

Demikian pula bila pembangunan di Madura dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan proses industrialisasi dilakukan secara mendadak maka akan muncul gejala 'penolakan' yang berakibat munculnya konflik sosial. Fakta menyebutkan bahwa masyarakat Madura mayoritas hidup di pedesaan bercorak pertanian tradisional yang secara cepat berubah menjadi masyarakat industri (*Industrial Society*) yang diasosiasikan dengan masyarakat massa yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. penciptaan negara-bangsa yang berkerapatan (*cohesive nation-state*) yang diorganisasikan di seputar satu bahasa dan kebudayaan bersama.
2. komersialisasi produksi dan menghilangnya ekonomi swadaya (*subsistence economy*)
3. dominannya mesin-mesin produksi dan organisasi produksi di dalam pabrik
4. penurunan proporsi penduduk pekerja yang terikat di dalam pertanian

¹³ Ida Ruwaida Noor, *Ekonomi Rakyat dan Modal Sosial*, (Jakarta: masyarakat Jurnal Sosiologi Laboratorium Sosiologi FISIP UI, No. 8 tahun 2000), hal. 64

¹⁴ MM. Billah, *Industrialisasi*, Makalah tidak diterbitkan, 2001.

¹⁵ Penulis adalah sebagai salah satu anggota tim ahli penyusunan Program Percepatan Suramadu. Baca *Pokok-pokok Pikiran Sosial Budaya* dalam Rangkuman Pokok-pokok Pikiran Tim Ahli terkait Program Percepatan Pembangunan Madura, kerjasama

Bappeprov Jatim dengan Universitas Trunojoyo Madura, 2008, hal 75.

5. urbanisasi masyarakat
6. pertumbuhan melek-huruf massa
7. penghargaan hak pilih penduduk dan pelembagaan politik (*institutionalization of politics*) di seputar partai massa
8. penerapan ilmu pengetahuan (*science*) pada semua lingkup (*sphere*) kehidupan, khususnya produksi industrial, dan rasionalisasi yang gradual dari kehidupan sosial¹⁶.

Industrialisasi memang menciptakan perubahan dan perubahan inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat Madura. Masyarakat Madura pada hakikatnya bukan tidak setuju (anti) industrialisasi karena industrialisasi sebagai media meningkatkan ekonomi rakyat namun bagaimana proses industri secara konsisten melibatkan *stakeholders* sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.

Upaya industrialisasi di Madura mendapat tantangan dari ulama BASSRA (Badan Silaturrahi Ulama' Pesantren Madura). Bagi mereka, industrialisasi Madura tetap belum jelas. Hal ini nampak sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Dari sederetan pertanyaan itu terungkap bahwa mereka memandang industrialisasi sebagai sesuatu yang *syubhat* (tidak jelas/samar-samar/hukumnya berada diantara halal dan haram) yang bisa menguntungkan dan juga merugikan. Menguntungkan bagi yang siap dan merugikan bagi yang tidak siap¹⁷.

Dalam perkembangan berikutnya, NU se Madura turut merespon kehadiran

jembatan Suramadu yang lebih mengarah kepada eksekusi negatif yang salah satu rekomendasi pasca audiensi dengan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Maret 2009 adalah dalam hal pengembangan industri di Madura, diperlukan adanya regulasi dan selektifitas industri yang 'menjamin' terpeliharanya nilai-nilai agama, tradisi lokal/kultur Madura serta memprioritaskan pekerja pribumi Madura¹⁸.

Secara spesifik penulis menggaris bawahi rekomendasi diatas dalam hal memprioritaskan pekerja pribumi. Ini penting karena apabila para pekerja industri 'impor' dari luar Madura maka akan semakin nampak potensi pengangguran di Madura atau hanya jadi buruh mesin. Namun usaha mempekerjakan pribumi Madura harus disertai dengan *skill* yang jelas sebab bila tidak posisi tawar mereka rendah dan mereka akan menjadi pekerja mesin.

Bagaimanapun, masuknya pemilik modal besar yang disertai beroperasinya mesin-mesin industri merupakan kondisi-kondisi terbentuknya suasana dan lingkungan baru kehidupan masyarakat Madura kelak. Meski demikian, beroperasinya mesin-mesin industri besar di Madura menurut Latief Wiyata¹⁹ tidak akan mengubah karakteristik sosial budaya masyarakat Madura yang menonjol yakni spontan, responsif, terus terang, apa adanya, dan tidak suka basa-basi. Karakteristik sosial budaya ini patut diperhitungkan para pemilik modal yang akan masuk Madura. Pengoperasian mesin-mesin industri besar secara ekonomi tentu lebih bersifat padat modal (*capital intensive*) daripada padat karya

¹⁶ Silahkan baca Aberecrombie, *Dictionary of Sociology*, (London; Penguin Books, 1988), hal. 122-123

¹⁷ Muthmainnah, *Jembatan Suramadu Respon Ulama terhadap Industrialisasi*, (Yogyakarta: LKPSM, 1998), hal 82

¹⁸ M. Ali Al Humaidy, Harian Surya, 10 Juni 2009

¹⁹ A Latief Wiyata, *Suramadu Dan Konflik Kekerasan*, Kompas, 20/8/2003

(labor intensive). Dengan kata lain, keberadaan Jembatan Suramadu akan lebih berorientasi pada kepentingan pemilik modal besar daripada kepentingan orang Madura sendiri.

Logika kapitalisme menempatkan posisi/kelas sosial seseorang dan pola hubungan sosialnya berdasar akses dan distribusi penguasaan properti/alat produksi. Orientasi akumulasi profit dengan pendekatan 'surplus nilai' telah mereduksi manusia sebagai variabel ekonomi, yang berimplikasi pada terjadinya dehumanisasi bahkan alienasi. Artinya, meski manusia terlibat dalam proses produksi, namun ia merasa asing dari proses produksi berikut outputnya. Hal ini dimungkinkan karena etika sosial atau moal tidak dikenal dalam sistem kapitalisme.

Di sini jelas terlihat, munculnya industrialisasi menghadirkan dampak (positif negatif) dan adanya perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

Dalam perspektif pertukaran sosial, George Simmel dengan gagasannya tentang 'filsafat uang' menyatakan bahwa bentuk hubungan sosial yang impersonal sangat

dipengaruhi oleh 'nilai' penting akumulasi profit bagi pihak-pihak yang berinteraksi sosial. Uang telah berperan penring dalam pertukaran sosial seiring dengan adanya komersialisasi komoditi. Selama ini dalama masyarakat 'barter' pertukaran komoditi hanya berbasis 'nilai guna/pakai' atas darah hubungan personal. Adanya perubahan nilai tukar ini telah berimplikasi pula pada perubahan bentuk hubungan sosial²⁰.

Kondisi ini yang sejak awal diawatirkan Marx bahwa ketika kekuatan kapitalis merasuk ke dalam para pekerja (buruh) posisi mereka tertekan bahkan merasa asing (alienasi) dengan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya disuruh bekeja untuk menghasilkan laba yang besar sementara para pekerja tidak mendapatkan *sharing* dari keuntungan tersebut.

Kehadiran jembatan Suramadu akan menimbulkan 'orientasi' karakter khususnya hubungan industrial (*Industrial Relation*) melingkupi hubungan kerja dan lembaga yang berkaitan dengan industri. Hubungan ini melingkupi hubungan antar pekerja, kelompok-kelompok kerja, organisasi buruh dan managers, perusahaan dan organisasi majikan. Kajian tentang hubungan industrial adalah kajian yang bersifat lintas disipliner, yang ditarik secara kuat pada ranah sosiologi industrial, ekonomi tenaga kerja dan sejarah perserikatan buruh (*trade union*), dan pada tingkat yang lebih kecil psikologi dan ilmu politik²¹

Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang

²⁰ Jonathan H. Turner, *The Struktur of Sociological Theori*, (Belmont-California: Wadsworth Publishing Company, 1991), hal. 300

²¹ Abercrombie, 1988, hal. 122

disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Di kota-kota besar, munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh yang menentang kebijakan pemilik pabrik yang seringkali didukung oleh negara (*state*) adalah salah satu bentuk perbedaan pendapat dan kepentingan antara kelompok pemilik modal atau kaum buruh. Fenomena ini termasuk dalam kategori konflik, walaupun tidak mengarah kepada pertentangan fisik.

Tentu, tuntutan besarnya peran negara dalam melindungi ekonomi rakyat akan berhadapan dengan 'logika kapitalisme' (paradigma ekonomi neo klasik), yang justru meminimalkan peran negara karena lebih menganalkan mekanisme pasar. Pada kondisi ini, keteguhan negara/pemerintah diuji. Sejarah menunjukkan pemerintah berkecenderungan bersikap ambivalen karena justru tergiring mengikuti gerak kapitalisme, yang berimbas pada semakin termarginalisasinya rakyat kecil.

Dalam kaitan ini tindakan ekonomi sebagai tindakan sosial. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa tindakan ekonomi merupakan tindakan sosial yang

disituasikan oleh sosial dan institusi-institusi ekonomi yang ada juga merupakan konstruksi sosial. Proposisi ini berakar dari pemikiran Marx Weber tentang tindakan sosial yaitu tindakan yang berorientasi pada orang lain melalui makna-makna yang terstruktur. Artinya, pelaku melakukan penafsiran atas sistem norma-nilai yang dimiliki, dalam hubungan sosial yang berlangsung. Gagasan Weber ini kemudian dikembangkan oleh Swedberg dan Granovetter dengan konsepsi keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial²².

Penutup

Apabila masyarakat Madura termarginalkan dalam pembangunan Madura maka 'gagal'lah pembangunan jembatan Suramadu sebagai media peningkatan ekonomi Madura. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi rakyat, yang mana dinamika ini selain dipengaruhi oleh kondisi eksternal—khususnya kebijakan negara—juga terkait dengan visi dan strategi pemilik usaha dan jaringan usahanya.

Sebagai penutup tulisan sederhana ini bahwa kehadiran Suramadu secara paradigmatik tidak hanya membangun di Madura namun membangun Madura secara ekonomi dan SDM, sehingga perlu upaya revoltif untuk mempersiapkan masyarakat Madura agar tidak menjadi 'objek' pembangunan tapi justru sebagai 'subjek' pembangunan, dan pembangunan tersebut bernilai Indonesiawi, Madurawi dan Islami. Sebab apabila yang terjadi hanya membangun industri di Madura tanpa diimbangi konsep *empowering* yang jelas, maka ini awal

²²Baca Mark Granovetter, *The Sociology of Economic Life*, (Westview Press Oxford, 1992), Hal. 6-19

bencana karena akan tercipta kemiskinan baru, masyarakat Madura termarginalkan

dan 'terjajah secara ekonomi'. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□□.

